BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegagalan negosiasi Juba Peace Talks pada tahun 2008 antara pemerintah Uganda dan kelompok pemberontak Lord`s Resistance Army (LRA) terjadi ketika Joseph Kony pada akhir kesepakatan gagal menandatangani perjanjian perdamaian.[1] Hal tersebut membuat pemerintah Uganda memutuskan untuk mengakhiri pendekatan politis dan beralih pada operasi militer dalam rangka mengakhiri pemberontakan kelompok LRA dan penangkapan Joseph Kony.

Konflik LRA di wilayah Uganda sendiri sudah berlangsung lebih dari dua dekade dari tahun 1987 sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 menjadi awal dimana seluruh pasukan kelompok LRA yang berada di negara Uganda dan negara Sudan Selatan[2] berpindah ke Taman Nasional Garamba di wilayah negara Republik Demokratik Kongo (RDK).[3] Selain menyebar ke RDK, LRA juga telah melakukan mobilisasi pasukannya ke daerah negara Sudan Selatan dan negara Afrika Tengah seperti yang terlihat pada peta 1.1

\

[1] Mareike Schomerus, " The Lord`s Resisitance Army in Sudan A history and Overview," Institute of International Studies HSBA Working Paper 8. http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-08-LRA.pdf (diakses pada 03 Februari 2013) 38.

[2] Andre Le Sage, "Countering The Lord`s Resistance Army in Central Africa," http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/134652/ipublicationdocument_singledocument/1c5c097b-d395-41ff-9dad-aa913e6fd6c7/en/SF+270+Le+Sage.pdf (diakses pada 03 Februari 2013) 5.

[3] Sage, “Countering Lord’s Resistance Army,” hal. 6

Peta 1.1 Wilayah Konflik LRA

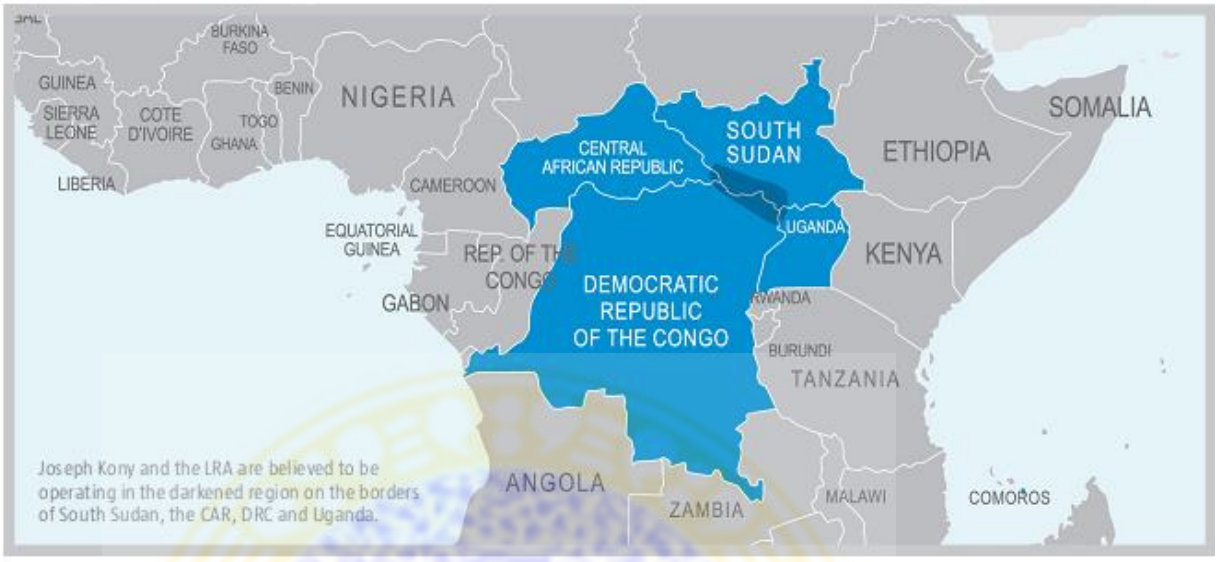

Sumber: Senate Government (2013)

Kelompok LRA merupakan salah satu kelompok pemberontak yang unik jika berbicara masalah agenda, tujuan dan motif dari pemberontakannya. Sama seperti kelompok pemberontak lainnya, LRA juga ikut bertnggung jawab dari semua tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini dilakukan. Pada awalnya, Kony membentuk sebuah kesatuan dari berbagai kelompok pemberontak yang ada di Uganda Utara, menjadi satu kelompok. Meskipun begitu, dasar utama kepercayaan spiritual dari Kony adalah masalah sosial-politik kaum Acholi waktu itu.Interpretasi Kony kemudian berubah menjadi sangat destruktif. Akhir 1980an, LRA melakukan konsentrasi serangan terhadap angkatan militer pemerintahan. Namun sejak tahun 1992, LRA mulai melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Kony mengatakan bahwa LRA diberikan kewajiban untuk menghukum semua orang yang menolak permintaannya menjadi anggota LRA, dan anak-anak dari mereka harus diculik, dan dibakar hingga mati.[4]

Pernyataan di tahun 1992 tersebut diperlihatkan oleh beberapa kasus penyerbuan LRA di tahun yang sama. Anggota LRA membakar rumah warga,

[4]International Crisis Group, "Northern Uganda: Understanding and Solving The Conflict," http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2004/africa/northern-uganda-understanding-and-solving-the-conflict.aspx (diakses pada 20 Januari 2013), 3.

menculik anak, dan menggunakan machetes (parang) untuk menghukum (dalam artian membunuh) warga tersebut. Kenyataan ini juga sebagai bentuk balas dendam terhadap warga yang mendukung pemerintah, dan menerapkan sistem pertahanan diri dengan menggunakan panah yang diberikan oleh pemerintahan di beberapa desa, di tahun 1991-1992.[5] Berbagai serangan dilakukan dengan cara penyerangan terhadap penduduk di wilayah-wilayah Uganda.[6] Dalam menghadapi penyebaran penyerangan kelompok LRA, pasukan militer pemerintah Uganda UPDF menggunakan pendekatan militer dengan tujuan dapat mengakhiri konflik LRA dengan segera. Terdapat tiga operasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Uganda yaitu Operation North, Operation Iron Fist dan Operation Lightning Thunder.[7] Operation Iron Fist tahun 2002 menjadi operasi militer yang banyak memberikan pengaruh terhadap penurunan intensitas serangan LRA.

Joseph Kony menyadari kerusakan yang terjadi akibat berbagai operasi militer yang dilakukan Uganda sejak tahun 2002. Kenyataan tersebut membuat Kony mengusulkan gencatan senjata, dan menyatakan bahwa LRA terbuka terhadap proses negosiasi. Operasi militer kemudian dihentikan untuk sementara dengan harapan bahwa konflik dengan LRA akan berakhir dengan cara non-koersif. Meski demikian, Kony memiliki agenda yang berbeda yang tidak sesuai dengan aktor-aktor pemerintah. Kony menggunakan taktik tersebut agar gempuran militer dapat dihentikan untuk sementara, dan waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran terhadap negara-negara tetangga (wilayah perbatasan). Tahun 2006 menjadi tahun LRA melakukan penyebaran secara keseluruhan, dari Uganda menuju negara Republik Demokratis Congo, Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan. Penyebaran tersebut dilakukan dalam waktu 2 tahun, dimana sedang dilakukan negosiasi yang disebut Juba Talks antara pemerintahan Uganda dan perwakilan dari LRA yang bukan merupakan anggota senior LRA karena adanya ketakutan akan ditahan oleh ICC.[8] Penyebaran

[5] International Crisis Group, "Northern Uganda," 3.
[6] Sage, "Countering Lord's Resistance Army", 3.
[7] Chris Dolan, "Initiative to End," http://theresolve.gopagoda.com/wp-content/uploads/2013/07/11s-Accord-supplement-11_Northern-Uganda update_2010_ENG_F_0.pdf (diakses pada 20 Januari 2013), 25 -26
[8] International Crisis Group, "Northern Uganda," 230.

di Sudan Selatan pertama terjadi di tahun 2006, Republik Demokratis Congo di tahun 2008, dan Republik Afrika Tengah pada Februari 2008.[9]

Pada tahun 2005 International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan kepada lima pimpinan tertinggi kelompok LRA yaitu Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Ogwen Dominic and Lukwiya Raska.[10] Hal tersebut merupakan respon dari permintaan bantuan dari pemerintah Uganda pada ICC sebagai langkah untuk mengakhiri pemberontakan kelompok LRA. Sadar bahwa kapasitas LRA telah menurun drastis akibat serangan operasi militer, Joseph Kony menginisiasi sebuah prosesi perdamaian melalui negosiasi.

Dari dua peristiwa tersebut menjadi alasan untuk adanya inisiasi dilakukannya negosiasi antara pemerintah Uganda dan kelompok LRA yang dimediasi oleh Riek Machar, Presiden Sudan Selatan. Sedangkan perwakilan dari LRA adalah Martin Ojul dan Ruhakana Ruguna, Menteri hubungan dalam negeri, sebagai perwakilan dari pemerintah Uganda.[11] Negosiasi ini berlokasi di Juba, wilayah negara Sudan, yang dikenal sebagai Juba Peace Talks.

Gagalnya penandatangan perjanjian perdamaian antara pemerintah Uganda dan kelompok LRA membuat pemerintah Uganda kembali melakukan pendekatan militer untuk menghentikan kelompok LRA dan menangkap Kony. Operation Lightning Thunder (OLT) dilakukan dengan menyerang kamp-kamp pasukan LRA yang berada di daerah Taman Nasional Garmba, negara RDK yang berbatasan dengan wilayah Uganda Barat. Serangan OLT oleh pemerintah Uganda yang didukung oleh pemerintah Sudan Selatan, RDK, dan Republik Afrika Tengah[12] juga tidak berhasil ketika Kony berhasil kabur dari serangan

[9]Enoughproject, "The LRA in Congo, CAR, and South Sudan," http://www.enoughproject.org/conflicts/lra/congo-car-southsudan (Diakses pada 20 Januari 2013).
[10] Dolan, “Initiative to End”, 9
[11] Dolan, “Initiative to End”, 9 -10
[12] Ted Dagne, "Uganda: Current Conditions and the Crisis in North Uganda,” http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33701.pdf (diakses pada 20 Januari 2013), 11.

tersebut.[13] OLT dilakukan pada 14 Desember 2008 oleh pasukan militer Uganda (UPDF), pasukan militer RDK (FARDC), dan Sudan Selatan (SPLA).[14]

Penyebaran LRA dari negara Uganda ke negara RDK, Republik Afrika Tengan, dan Sudan Selatan menyebabkan konflik yang terjadi berlangsung lama dan berlarut–larut (*protacted social conflict*). Serangan LRA membawa dampak pada banyaknya pengungsi dan penduduk sipil yang meninggalkan rumahnya disebut Internal Displaced Persons (IDP). Jumlah IDP di Republik Afrika Tengah 10.850 orang dan 67.548 orang di Sudan Selatan serta yang terbanyak adalah sekitar 280.000 orang di RDK.[15] Berikut merupakan grafik jumlah pengungsi akibat konflik yang terjadi di RDK. Grafik 1.1[16] menunjukkan bahwa jumlah pengungsi di RDK mengalami penurunan pada tahun 2003, akan tetapi terdapat peningkatan jumlah pengungsi pada tahun 2008 akhir sampai tahun 2009. Pada waktu tersebut LRA sudah berada dan melakukan penyerangan terhadap warga sipil di wilayah RDK.

[13] Anonymous, "Chapter 1", 13.
[14] David Mwaniki dan Mansseh Wepundi, "Juba Peace Talks," http://www.issafrica.org/publications/situation-reports/situation-report-the-juba-peace-talks-the-checkered-road-to-peace-for-northern-uganda-david-mwaniki-and-manasseh-wepundi (diakses pada 25 Jnauari 2013).
[15] Human Right Watch, "Trial of Death", http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/search?page=49e45c366&skip=90&cid=49aea93a7d&coi=COD, (diakses pada 01 Maret 2013).
[16] Human Right Watch, "Trial of Death"

Grafik 1.1 Jumlah Pengungsi dari Wilayah RDK

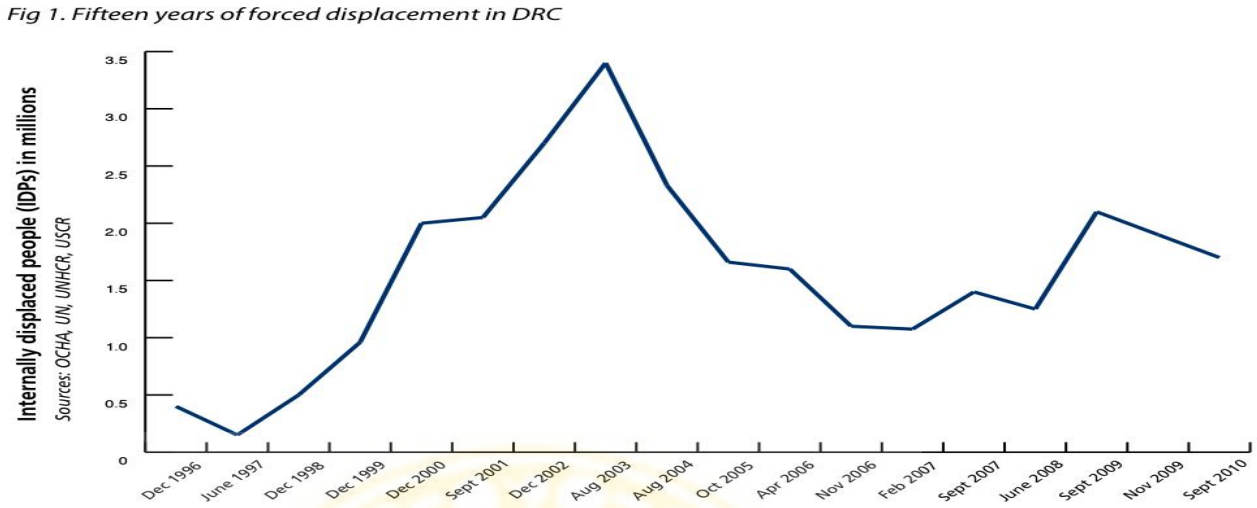

Sumber: Human Right Watch, "Trial of Death." (2013)

Dari pemaparan diatas, yang membuat masalah ini menarik adalah konflik kelompok LRA telah terjadi sejak dua dekade terakhir dan sampai sekarang belum terselesaikan walaupun dengan upaya politik maupun militer antara pihak - pihak yang terkait konflik. Kegagalan Juba Peace Talks dan operasi militer Operation Lightning Thunder tahun 2008 membawa dinamika konflik kelompok LRA mengalami eskalasi. Penyebaran LRA ke negara-negara tetangga yaitu Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo telah banyak menjatuhkan banyak korban. Alasan penulis memilih negara RDK adalah kelompok LRA secara masif telah melakukan serangan terhadap penduduk sipil yang menewaskan korban terbanyak di negara ini. Selain itu, eskalasi konflik lebih banyak terjadi di RDK dibandingkan di Sudan dan Republik Afrika Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan maka penulis mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana konflik Lord`s Resistance Army vs Uganda berlanjut di Republik Demokratik Kongo tahun 2008-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dari sebuah konflik, yaitu sebuah konflik dapat meluas ke wilayah

di luar konflik berasal. Dalam hal ini konflik Lord`s Resistance Army setelah gagal menyepakati negosiasi Juba Peace Talks dengan memindahkan seluruh pasukannya meninggalkan wilayah Uganda menuju wilayah Republik Demokratik Kongo.

1.4 Kerangka Pemikiran

Coser membuat suatu pembedaan yang penting mengenai konflik yang disebabkan isu-isu realistik, yang selanjutnya disebut konflik realistik dengan konflik yang disebabkan isu-isu non realistik yang selanjutnya disebut konflik non realistik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis misalnya konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik non realistik merupakan tujuan dari konflik itu sendiri. Konflik ini merupakan suatu cara untuk menurunkan ketegangan di dalam kelompok atau mempertegas identitas suatu kelompok. Cara ini mewujudkan bentuk-bentuk kekerasan yang sesungguhnya berasal dari sumber-sumber lain. Statement Coser mengenai konflik non-realistik dalam The Function of Social Conflict adalah sebagai berikut:

> "in realistic conflict, there exist functional alternatives with regard to the means of carrying out the conflict, as well as with regard to accomplishing desired results short of conflict"[17]

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktifitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting sekali diketahui dan digunakan bersama alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Konflik dapat terjadi dalam beberapa tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik.[18]

Tahapan-tahapan tersebut dapat dideskripsikan sebagai yaitu: (1) Prakonflik.Tahapan Ini merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik

[17] Coser, *The function of Social Conflict,* (1957), 156
[18] Miall, Hugh, Ramsbotham, O. and Woodhouse, T., *Contemporary Conflict Resolution,* (2011), 67

tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. (2) Konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua belah pihak. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung di masing-masing pihak. (3) Krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/ atau kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal di antara kedua belah pihak kemungkinan terputus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lain. (4) Akibat. Pada tahapan ini, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan agak menurun dengan memungkinkan adanya penyelesaian. Sebagai contoh adalah perubahan pola hubungan masyarakat, kerekatan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, munculnya tata aturan baru dan lain-lain. (5) Pascakonflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak dapat disesesaikan dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.[19]

Menurut Summerfield dalam sebuah konflik kontemporer terdapat suatu kondisi dimana sebuah konflik yang sulit diselesaikan dan adanya hambatan dalam melakukan penyelesaian konflik yang disebut dengan *complex emergencies. Complex emergencies* terjadi ketika *warlords* dan *militias* telah membangun kekuasaan dan dominasinya terhadap warga sipil. Kondisi tersebut *warlords* dan *militias* menciptakan suatu keadaan ketakutan (*state of terror*) pada masyarakat sipil dengan melakukan kekerasan tanpa menghiraukan hukum humaniter, dimana wanita, anak-anak, dan orang tua juga menjadi target.[20]

[19] Hugh, Rambsbotham and Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution, 127.*
[20] Hugh, Rambsbotham and Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution,* 128.

Menurut Mackinlay,[21] keadaan seperti itu dihasilkan dari adanya kepentingan pihak-pihak yang bertikai. Keberadaan militia dan kepentingannya dalam menguasai dan memeras penduduk lokal akan menghambat usaha pertolongan terhadap warga sipil. Penduduk sipil merupakan target bukan korban dari perang yang terjadi.

Menurut Outram[22], *warlordism* terjadi dalam konflik kontemporer dimana terjadi kekerasan yang bukan lagi bersifat *inter-ethnic* melainkan bersifat *factional* dan didorong oleh *economic predation*. *Economic predation* ini dilakukan melalui dua cara yaitu dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang mereka kuasai atau melalui perampasan dan pencurian terhadap penduduk sipil. Usaha yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer untuk menciptakan suatu keadaan ketakutan terhadap masyarakat. Perilaku ini memiliki karakter kekejian terhadap masyarakat dan ekonomi melalui kekerasan militer. Hal tersebut sangat tidak rasional mengingat kekerasan yang terjadi tidak menguntungkan secara ekonomis. Jadi kekerasan yang dilakukan jauh dari hanya motif ekonomi. Hal ini diperjelas oleh Nordstrom[23] bahwa berbagai kekerasan, pengrusakan, dan penggunaan teror yang dilakukan warlords itu sangat menghambat proses resolusi konflik karena didalamnya terjadi kekacauan dan ketidakstabilan keamanan yang sulit diatasi.

Zartman menyebutkan dalam upaya penyelesaian konflik dibuat sebuah resolusi yang bertujuan untuk menguntungkan semua pihak yang berkonflik. Resolusi konflik dapat dicapai melalui 3 cara, yakni negosiasi, mediasi, dan intervensi.[24] Dalam beberapa negosiasi ada dua pilihan fundamental: pertama, mecapai kesepakatan dengan pihak lain dan kedua, tidak melakukan kesepakatan apapun. Sebuah negosiasi dapat mengalami kondisi *dealock* apabila disebabkan oleh beberapa faktor seperti aspek *cognitive-perceptual*, dimana terdapat perbedaan pemahaman tentang peraturan dalam negosiasi oleh salah satu atau kedua belah pihak dan ketakutan terhadap konsekuensi atau hasil akhir yang belum jelas. Personal-relational, ketiadaan dari ketertarikan, kepercayaan,

[21] Hugh, Rambsbotham and Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution,* 129.
[22] Hugh, Rambsbotham and Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution,* 131.
[23] Hugh, Rambsbotham and Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution,* 132.
[24] Zartman and Faure, *Escalation and Negotiation,* 6.

perubahan kepentingan konflik kearah konflik individu. Seperti yang terlihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Faktor-Faktor *Deadlock*

Categories	Causes
Cognitive–perceptual	Differences in understanding of the rationale of the game and in perceptions; fear of uncertain consequences
Personal–relational	Lack of affinity; aggressive, arrogant, or condescending attitude; seemingly dishonest behavior; conflict of interest turned into a personal conflict; absence of trust
Contextual	Pressures from peer group, organization, administrative authorities
Structural	No more resources available; power relationships; strongly conflicting issues
Process–behavioral–strategic	Concessions not made in an appropriate way; process inconsistencies
	Insufficient information; deluded expectations, unkept promises, and unfair trade-offs
	Attempts to influence a third party, to gain side benefits, to move the negotiation to a higher level of authority
	Costs inflicted on the other party are higher

Sumber: Zartman and Faure, *Escalation and Negotiation*. (2006)

Dalam proses sebuah negosiasi, hasil negosiasi akan menggambarkan dan mempengaruhi konflik yang sedang terjadi. Hopmann dan Walcott dalam penelitiannya menunjukkan terdapat efek timbal balik antara proses negosiasi dan tingkat ketegangan antara pihak yang berkonflik. Proses negosiasi menggambarkan ketegangan konflik dan ketegangan itu dipengaruhi oleh hasil akhir dari negosiasi. Maksudnya adalah eskalasi atau de-eskalasi konflik ketika diadakannya negosiasi berpengaruh terhadap hasil negosiasi yang juga akan menentukan jalan atau kelanjutan dari konflik itu.[25]

Seperti telah disebutkan diatas konflik yang berkepanjangan menghambat penyelesaian konflik. Negosiasi sebagai salah satu resolusi konflik bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Kegagalan negosiasi sebagai pendekatan politis dapat berdampak pada dinamika konflik. Ho Won Joeng menyatakan bahwa re-eskalasi bisa terjadi disertai dengan negosiasi yang gagal dan munculnya keterpaksaan dalam negosiasi. Terjadinya eskalasi tentunya dapat mengubah dinamika internal dan eksternal konflik, ketika

[25] Faure, *Deadlocks in Negotiation Dynamics,* 31.

satu pihak merasa lebih unggul dibandingkan pihak lawan menyebabkan spirit perjuangan muncul kembali.[26]

Mengacu pada perkembangan konflik etnis yang mengalami internasionalisasi, bahwa terdapat beberapa kriteria sebagai berikut yaitu: pertama, adanya dukungan dari pihak luar baik berupa *ethnic skin* dan diaspora atau negara. Negara sebagai aktor dominan dalam politik internasional. Keterlibatan negara dalam sebuah konflik tentunya berdasarkan kepentingan dari negara tersebut, bahwa negara melakukan intervensi dengan tujuan sebagai aktor pendamai atau aktor yang mendukung kelompok yang melakukan pemberontakan.[27] *Collective security* sering terjadi dalam keadaan sebuah negara yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam menyelesaikan sebuah ancaman keamanan yang terjadi di negara itu sendiri. Negara yang menjadi anggota pada *collective security* ini terdiri atas negara-negara yang berbeda, sesuai dengan kepentingan negara-negara tetangga dalam melihat ancaman yang dihadapi. Ancaman yang bersifat regional, cenderung akan diselesaikan dengan sebuah *collective security* yang bersifat regional (terdiri atas beberapa negara dari sebuah kawasan yang sama).[28]

> "Effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the supression of acts of agression or other breaches of peace"[29]

Kedua, adanya pengungsi sebagai hasil dari konflik yang terjadi. Munculnya pengungsi ke wilayah atau negara lain tentunya memberi pengaruh pada munculnya konflik baru dengan latar belakang kepentingan ekonomi, politik, dan perubahan sosial. Meningkatnya jumlah pengungsi ke negara lain dapat menimbulkan berbagai macam konflik seperti terganggunya keamanan negara

[26] Joeng, *Understanding Conflict and Conflict Analysis,* 105.
[27] Wardhani*, Globalisasi & Konflik Etnis, 16-21.*
[28] Cracker,Hampson and Aall, *Turbulent Peace,* 230.
[29] Arend and Beck, *International Law,* 112.

tujuan, menyebabkan perubahan demografi negara tujuan dan dapat memunculkan konflik sipil antara penduduk lokal dengan pengungsi itu sendiri.[30]

Ketiga, adanya keterlibatan PBB sebagai pihak ketiga yang mengintervensi konflik.[31] PBB dalam konflik yang menjadi perhatian internasional banyak melibatkan diri dalam konflik yang terjadi. Dewan Keamanan PBB, yang memiliki hak untuk menerapkan sebuah mekanisme penyelesaian konflik (bahkan termasuk intervensi kemanusiaaan) kepada aktor-aktor yang sedang berkonflik.[32] Beberapa metode yang digunakan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu *enforcement* dan *peacekeeping*. E*nforcement* (pemaksaan) sebagai respon terhadap ancaman keamanan dan perdamaian internasional. Cara pemaksaan tersebut dilakukan melalui sanksi ekonomi hingga militer, sesuai dengan Piagam PBB Chapter VII: *Action with respect to threats of peace, breaches of the peace, and acts of agression*.[33]

Peacekeeping, penjaga perdamaian sangat berbeda dengan sebuah operasi militer, sebab penjaga perdamaian tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjatanya. Namun kini, penggunaan senjata diperbolehkan agar tujuan dari penggunaan tersebut adalah secara fisik melindungi masyarakat setempat. Pasukan perdamaian bersifat sangat multidimensional yang tidak hanya ditunjuk untuk menjalin perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk fasilitasi proses politik, melindungi warga negara, asistensi gencata senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan pemberontak, mendukung organisasi pemilihan umum, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, serta mengembalikan hukum sebagai aturan yang mengikat dalam negara.[34]

Keempat, adanya kaitan dengan terorisme. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak seringkali berkaitan dengan aksi terorisme. tindakan kekerasan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kelima, adanya elemen

[30] Wardhani*, Globalisasi & Konflik Etnis, 24-26.*
[31] Wardhani, *Globalisasi & Konflik Etnis, 27.*
[32] Starke, *Pengantar Hukum Internasional,* 281.
[33] Wallensteen and Staibano, "International Sanctions," 7.
[34] Thakur and Schnabel, "United Nations PeaceKeeping Operations," 48.

iredentisme. Suatu daerah yang ingin memisahkan diri atau bergabung dengan negara lain dipicu oleh adanya ikatan emosional kelompok etnis terhadap etnis yang sama sebagai kelompok minoritas di negara atau daerah lain.[35]

Selain itu, beberapa isu lintas batas negara seperti hak asasi manusia, krisis sumber daya alam dan lainnya yang dapat meningkatkan intensitas konflik etnis di tingkat nasional, juga menjadi faktor penting dalam proses perkembangan konflik ke tingkat internasional. Johan Galtung menjelaskan sebuah model resolusi konflik yang penulis anggap penting dalam mencari penyelesaian pada konflik yang berkepanjangan. Model tersebut bernama *Spheres of Cosmopolitan Conflict Resolution*.[36] Dijelaskan dalam model ini, bahwa sebuah konflik terjadi awalnya pada tingkatan *state/social* level (tingkat internal negara). Seiring dengan waktu, beberapa konflik akan menyebar, sehingga membawa sebuah ancaman terhadap tingkatan regional di sekitar terjadinya konflik tersebut.[37] Sesuai dengan model konflik Johan Galtung di tahun 1996 menjelaskan bagaimana perang sipil telah mencapai tingkatan regional, ketika sebuah konflik internal telah menyebar atau mengalami *regional spillover* menuju negara-negara tetangga dari negara asal konflik itu sendiri.[38] Sejalan dengan penjelasan Brown bahwa konflik etnis biasanya berangkat dari konflik lokal yang sama sekali tidak memiliki basis etnisitas, tetapi kemudian melebar cakupannya, bahkan sampai melintasi batas batas negara.[39]

Lobell dan Mauceri (2004) juga menganalisis bahwa konflik etnis bisa mengalami difusi atau eskalasi hingga menjadi permasalahan internasional karena beberapa faktor, yakni: melemahnya struktur lembaga negara; menguatnya aktor bukan negara di tingkat regional maupun internasional dalam melemahkan kedaulatan negara dan sebaliknya memperkuat aktor domestik; terdapat perubahan *balance of power* dalam konteks etnis yang secara nyata maupun potensial berakibat pada persaingan, perebutan, dan pembagian sumber-sumber

[35] Wardhani, *Globalisasi & Konflik Etnis, 30-34.*
[36] Johansen and Jones, *Experiments with Peace,* 33.
[37] Johansen and Jones, *Experiments with Peace,* 34.
[38] Galtung, *Peace by Peaceful Means,* 58
[39] Brown, *International Dimension of Internal Conflict,* 81.

sosial, ekonomi, dan politik; serta adanya tingkat integrasi ekonomi, sosial, dan kultural kelompok etnis tertentu, baik di tingkat regional maupun global.[40]

Eskalasi juga terjadi ketika konflik yang terjadi di sebuah negara memicu keterlibatan unsur asing, baik negara tetangga yang berbatasan maupun kekuatan besar lainnya utnuk melakukan intervensi dalam konflik tersebut[41]. Ada empat cara yang menyebabkan terjadinya eskalasi konflk[42] yaitu: pertama, ketika suatu kelompok etnis menggunakan wilayah negara lain untuk berlindung, berlatih perang atau menggunakan negara negara kedua sebagai markasnya baik dengan persetujuan maupun tidak dari negara kedua. Kedua, ketika terdapat dimensi iredentis di salah satu negara. Ketiga, ketika pemimpin di suatu negara memainkan modus etnis di negara lain yang menyebabkan terjadinya konflik di negara yang dituju. Keempat, ketika pemimpin di negara tertentu memanfaatkan konflik internal di negara lain untuk mencapai target kepentingannya.

Menurut Gleditsch et. al. eksternalisasi adalah sebuah fenomena yang menurut pemerintah terlibat dalam perang saudara dapat memulai aksi militer terhadap negara-negara tetangga karena dua alasan mendasar. Pertama, pemerintah-pemerintah ini dapat melakukan tindakan kontra lintas batas karena pemberontak sering mencari suaka asing atau mencoba melarikan diri dengan mengarah ke lintas batas.[43] Seperti pernyataan mereka:

[40] Lobell and Maucheri, *Explaining Diffusion and Escalation*, 8.
[41] Lake and Rothchild, *Fear, Diffusion, and Escalation,* 23.
[42] Lake and Rothchild, *Fear, Diffusion, and Escalation,* 30-31.
[43] Gleditsch KS, Salehyan I, Schultz K., "Fighting at Home, Fighting Abroad: How Civil Wars Lead to International Disputes," *Journal of Conflict Resolution*, (2008), 479-506.

"in many cases, these external rebel bases may be welcomed and supported by foreign actors; in other cases, rebels may be able to flee to and/or operate from foreign soil simply because the host state is unable to control its borders. In either event, rebels located on another state's territory provoke strikes on external rebel positions and/or 'hot pursuit' raids across the frontier".[44]

Gleditsch et. al. misalnya, menunjukkan bahwa konflik antar negara dapat timbul ketika negara-negara eksternal melihat minat dalam kemenangan pemberontak. Mereka dapat mendukung pemberontak kelompok karena berbagai alasan: karena mereka ingin melemahkan saingan internasional dan menguras sumber daya mereka, yang akan memberi mereka keuntungan militer; karena mereka ingin untuk menghapus pemerintah yang tipe rezim dapat dianggap sebagai kebijakan radikal atau yang dipandang sebagai bermusuhan; karena jika konflik melibatkan separatisme mereka akhirnya bisa bergabung wilayah sengketa untuk mereka sendiri; karena mereka ingin melindungi kerabat etnis dari penindasan (dalam kasus konflik etnis); dan karena "dukungan satu negara untuk pemberontak bisa menyebabkan pembalasan dalam bentuk ".[45] Oleh karena itu, pendekatan ini menyediakan beberapa alat untuk memahami motivasi pelaku eksternal harus menerima atau menolak undangan oleh pihak dalam konflik untuk berpartisipasi dalam perjuangan internal.

Terdapat dua jenis cara untuk mencegah konflik Miall et al. menyebutnya sebagai *light prevention* dan *deep prevention*. *Light prevention* ini berupaya untuk mencegah situasi kekerasan mengarah pada konflik bersenjata sehingga dia tidak berusaha untuk menyelidik lebih dalam pada sumber dan akar konflik.[46] Contohnya adalah usaha-usaha mediasi dan intervensi diplomatik. Sedangkan *deep prevention* berupaya untuk menemukan akar konflik dengan menekankan hubungan dan kepentingan atas konflik tersebut dalam tatanan kapasitas domestik, regional, dan internasional untuk mengelola konflik, yang melibatkan seluruh elemen konflik dan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya

[44] Gleditsch KS, Salehyan I, Schultz K., "Fighting at Home," 486.
[45] Gleditsch KS, Salehyan I, Schultz K., "Fighting at Home," 484-485.
[46] Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution.*

konflik.[47] Untuk mencegah konflik atau perang sebelumnya harus diidentifikasi terlebih dahulu tipe konflik dan lokasi potensi-potensi konflik. Dan pencegahan bersifat relatif, bergantung pada aktornya baik konflik *interstate wars* maupun *non-interstate war*. *Interstate war* menitikberatkan pada perang yang dilakukan antara negara-negara dengan kapasitas *power* yang besar.[48] Misalnya adalah LBB dan Perjanjian Versailles bertindak sebagai alat preventif perang yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sementara *non-interstate war* mengarah pada konflik-konflik yang meliputi konflik etnis karena adanya stratifikasi sosial, polarisasi masyarakat, *inappropriate systemic, regional diasporas*, dan sebagainya.[49]

Berhasil atau tidaknya pencegahan konflik dapat dinilai dari beberapa tolak ukur, seperti implementasi kebijakan yang berlangsung segera dan cepat; adanya koordinasi antar aktor-aktor yang terlibat dalam pencegahan konflik; pendekatan yang cenderung bebas dari pemerintah atau negara-negara yang peduli; adanya pendekatan jangka panjang; dan keikutsertaan kepentingan nasional dari salah satu negara yang turut campur tangan.[50] Miall et al. juga menyebutkan bahwa pencegahan konflik dapat dikatakan gagal apabila terjadi konflik senjata (*light measures*) dan ketika situasi yang ada mengarah pada konflik yang lebih besar (*deep measures*).[51]

Mengingat langkah konsesi dalam negosiasi dilakukan bila pihak-pihak yang bernegosiasi menganggap langkah tersebut memang perlu dilakukan maka ada sebuah kemungkinan akan adanya sebuah kondisi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tidak ingin mengubah titik-titik resistensi masing-masing dan mereka telah menganggap bahwa pilihan mereka masing-masing merupakan

[47] Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution.*
[48] Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution.*
[49] Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution.*
[50] Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution.*
[51] Peter Harris and Reilly, Ben, t.t., "Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators," http://www.idea.int/publications/democracy_and_deep_rooted_conflict/upload/ddrc_full_en.pdf (diakses pada 20 Januari 2013).

batas yang tidak dapat diubah untuk dapat mencapai BATNA[52], maka negosiasi ini akan mendapatkan hambatan dalam mencapai kesepakatan dan ada pula ada sebuah perjanjian yang menjadi *deadlock* karena pihak-pihak terus ingin mempertahankan titik resistensinya.

Untuk menjelaskan proses munculnya proses internasionalisasi konflik diklasifikasikan dalam 2 hal yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Komponen dalam faktor domestik terdiri dari kepentingan domestik dan kelompok identitas. Internasionalisasi konflik berdasarkan komponen kepentingan domestik dijelaskan Mansfield dan Snyder menunjukkan bahwa ketika negara sedang dalam proses konsolidasi demokrasi dan transisi rezim, koalisi politik yang tidak stabil atau perebutan kekuasaan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kebijakan luar negeri yang agresif untuk memperkuat kontrol mereka dan menghilangkan saingan.[53] Disisi lain, Barnett dan Levy berpendapat aliansi antarnegara dapat terwujud karena konflik internal yang mengancam sebuah negara membuat pemimpin melakukan kerjasama dengan negara lain.[54] Berikut juga dijelaskan bahwa:

> "political leaders are often tempted to try to secure the material resources necessary to deal with (internal) threats (by placating disgruntled social groups or by other means) through external alliance formation rather than through internal extraction from a society that is already economically stretched and politically alienated. That is, Third World states often form external alliances as a means of confronting internal threats".[55]

[52]BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) dengan mengetahui apa yang menjadi BATNA kita dalam sebuah negosiasi, artinya kita mengetahui apa yang akan dilakukan saat menjalankan negosiasi dan mengetahui langkah apa yg akan diambil ketika negosiasi menemui jalan buntu. BATNA adalah acuan yang akan menuntun langkah-langkah yang diambil dalam proses negosiasi.

[53]Mansfield E, Snyder J., "Democratization and the Danger of War," (1995), 5-38. http://www.drworley.org/NSPcommon/Democratic%20Peace/IS-20,1-MansfieldSnyder.pdf (diakses pada 20 Januari 2013).

[54] Barnett M, Levy JS., "Domestic Sources of Alliances and Alignments," (1993), 378. http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/05_small_states_04.pdf (diakses pada 20 Januari 2013).

[55] Barnett M, Levy JS., "Domestic Sources of Alliances and Alignments," (1991), 387.

Pembahasan faktor identitas berdasarkan literature konflik etnis. Bahwa gerakan etnis cenderung membangun aliansi dengan kelompok-kelompok kerabat di berbagai negara, yang disebut *transnational minorities* atau kelas suku.[56] Konflik karena permasalahan etnis di negara-negara membuat para pemimpin menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan etnis yang berkonflik. Dalam hal ini, kelompok etnis akan memaksa pemerintahnya ikut merespon konflik beridentitas etnis yang sama.[57] Akan tetapi, untuk kasus yang sedang dibahas dalam penelitian tidak berkaitan dengan identitas etnis suatu negara yang berkaitan dengan negara lain. Jadi, faktor identitas ini tidak dibahas secara menyeluruh.

Kedua faktor internasional, peran aktor internasional erat kaitannya dengan intervensi. Sebuah konflik dapat memotivasi atau tidak untuk munculnya konflik di negara lain. Untuk intervensi pada sebuah konflik biasa dilakukan melalui cara-cara politik atau militer. Gleditsch et. al., misalnya, menunjukkan bahwa konflik antarnegara dapat timbul ketika aktor eksternal melihat adanya kepentingan dalam memenangan kelompok pemberontak. Mereka dapat mendukung kelompok pemberontak karena berbagai alasan yaitu: untuk melemahkan musuh atau saingan dan mengeksploitasi sumber daya alam, karena mereka ingin melemahkan saingan internasional dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang akan memberi mereka keuntungan militer. Keputusan untuk melibatkan diri dengan kelompok pemberontak dilakukan dengan ikut campur dengan wilayah sengketa.[58]

Mengacu pada tipe internasionalisasi dari Sandra P. Borda, terdapat dua tipe internasionalisasi yaitu internasionalisasi militer dan internasionalisasi politik. Internasionalisasi militer dijelaskan apabila pihak yang berkonflik mencari aliansi yang bertujuan untuk mendapat dukungan berupa bantuan militer atau logistic. Sedangkan internasionalisasi politik dijelaskan bahwa negara memiliki keuntungan untuk mendapatkan legitimasi dengan diakui oleh pihak internasional. Dalam internasionalisasi politik negara dapat mendapat dukungan untuk melawan

[56] Gurr TR., "The Internationalization of Protracted Communal Conflicts since 1945," (1993), 16.
[57] Saideman SM., "Explaining the International Relations of Secessionist Conflict," (1997), 722.
[58] Gleditsch KS, Salehyan I, Schultz K., "Fighting at Home," 484-485.

konflik internal dari pihak internasional. Di lain pihak, bagi kelompok pemberontak bertujuan untuk mendapatkan dukungan dengan beralasan kepentingan yang tidak didapat dari negara. [59]

Tabel 1.2. Tipe internasionalisasi dalam konflik

	Type of Internationalization	
	Military Internationalization	**Political Internationalization**
Invitees by the State	United States	Non committed neighbor states, some European states, International Organizations, among others.
Invitees by insurgent organizations	Revolutionary Governments, other insurgent groups	Non committed neighbor states, some European states, International Organizations, NGOs, among others.

Sumber: Borda, The Internazionalization of Domestic Conflcts. (2009)

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penulis mengajukan hipotesis bahwa setelah gagalnya kesepkatan pada negosiasi Juba Peace Talks, pasukan LRA meninggalkan Uganda dan berpindah ke negara perbatasan. Keterlibatan Uganda tetap berlanjut untuk memerangi LRA. Selain itu, konflik ini kemudian menjadi perhatian dari aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan dengan turut dalam konflik (intervensi). Keterlibatan unsur-unsur lain berpengaruh terhadap dinamika dan perkembangan konflik LRA dengan Uganda serta RDK.

1.6 Metodologi Penelitian

I.6.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Kegagalan negosiasi

Adam Watson (1982) mengkarakteristikkan hubungan diplomasi sebagai negosiasi-negosiasi antar kesatuan politik yang mana keduanya diketahui bersifat

[59] Sandra P. Borda., "The Internationalization Of Domestic Conflicts: A Comparative Study Of Colombia, El Salvador And Guatemala,".

independen. Itu artinya sesuai dengan pernyataan G.R. Berridge bahwa kegiatan dalam hubungan internasional lebih kepada negosiasi ketimbang paksaan, propaganda, atau permasalahan hukum atau melalui berbagai alat-alat perdamaian yang nantinya secara langsung dan tak langsung mengarah dalam kegiatan negosiasi.[60] Kemudian melalui negosiasi akan ditentukan bentuk *outcome* bersama apakah satu pihak yang menang atau semua pihak berhenti dalam usahanya untuk menang. Maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses mengkombinasikan posisi-posisi divergen/ berkonflik melalui komunikasi ke dalam sebuah *join decision.*[61]

Dalam jurnal yang berjudul *The Nature of Negotiation* juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara negosiasi dan *bargaining. Bargaining* mendeskripsikan iklim kompetitif, situasi *win-lose, flea market,* dan semacamnya. Sementara dalam *term* negosiasi lebih kepada situasi *win-win.* Studi dari Harold Nicholson juga menyumbangkan pemikiran yang berarti dalam menganalisis mengapa pelembagaan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik mengalami kegagalan. Nicholson memandang bahwa kegagalan negosiasi dalam penyelesaian konflik seringkali disebabkan oleh persoalan politisasi negosiasi. Nicholson mendefinisikan politisasi negosiasi sebagai kondisi di mana pihak-pihak yang bernegosiasi memanfaatkan peluang yang terdapat dalam negosiasi untuk memperoleh keuntungan dari celah atau titik-titik rawan dari pelaksanaan pre-negotiation tidak dilakukan secara cermat dan professional yang kemudian mengakibatkan pelaksanaan negosiasi menjadi tidak memiliki arah.[62]

1.6.1.2 Pengaruh Konflik Cross-Border

Internasionalisasi didefinisikan secara umum sebagai proses dimana sebuah keputusan eksplisit dan sadar dibuat, keputusan untuk melibatkan aktor-aktor internasional di setiap fase konflik atau negosiasi dalam konflik internal.

[60] Watson, Adam. 1982. *Diplomacy: The Dialogue Between States, (*London: Eye Methuen, 1982), 33.
[61] Zartman, I. William, *Negotiation and Conflict Management: Essays on theory and practice,* (New York: Routledge Handbook Publishing, 2008)
[62] Harold Nicholson, "Methaphors for Understanding International Negotiation"dalam Victor A Kremenyuk (ed.), *International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues*, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2002)

Keputusan untuk internasionalisasi (atau tidak) dapat dilakukan oleh agen yang berbeda, dapat dimulai dan kadang-kadang dilakukan oleh aktor eksternal (seperti negara hegemonik) atau dapat dilakukan oleh aktor non-negara dalam negeri. Dengan kata lain, konsep internasionalisasi bergerak sepanjang kontinum dimana aktor eksternal seperti negara-negara kuat atau tetangga, aktor non-negara baik organisasi internasional memutuskan untuk berpartisipasi dalam sebuah konflik. Dalam skenario ini, internasionalisasi mengarah dalam bentuk intervensi.[63]

Negara tetap menjadi aktor penting karena mereka membuat keputusan untuk berpartisipasi atau mengundang aktor luar untuk berpartisipasi dalam konflik internal.[64] Jelas, mereka bukan satu-satunya aktor, tetapi mereka adalah beberapa dari agen yang paling relevan yang membuat mesin bekerja internasionalisasi. Sandra mendefinisikan bahwa internasionalisasi jelas disengaja, dimaksudkan dan telah diperhitungkan.[65]

1.6.1.3 Eskalasi

Pengertian eskalasi menurut Kriesberg tidak harus identik dengan kekerasan. Eskalasi lebih diartikan dengan koersif. Eskalasi dalam pengertiannya adalah proses semakin meluasnya konflik. Semakin meluasnya konflik, dapat mencakup cakupan, aktor yang terlibat ataupun penggunaan alat-alat dalam konflik. Yang dimaksud dengan alat-alat disini antara lain: ancaman, hukuman, penggunaan tekanan baik dengan kekerasan ataupun tidak.[66] Sedangkan pengertian eskalasi menurut Mitchell, lebih melihat eskalasi identik dengan kekerasan yang bersifat destruktif dan tercermin dalam perilaku. Meningkatnya perilaku yang distruktive sejalan dengan meningkatnya tekanan dan perlakuan kekerasan. Jadi, perilaku eskalasi menurut Mitchell adalah kerusakan yang meningkat, perluasan aktor yang terlibat dalam konflik.[67]

---

[63] Brzezinski Z, "Post-Communist Nationalism. Foreign Affairs", https://wwwstage.foreignaffairs.org (diakses pada 20 Januari 2013).
[64] Sandra P. Borda., "The Internationalization of Domestic Conflicts".
[65] Sandra P. Borda., "The Internationalization of Domestic Conflicts".
[66] Kriesberg, Louis., *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution,* (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2007), 91.
[67] C. R. Mitchell., *a Willingness to Talk: Conciliatory Gestures and De-Escalation*.

1.6.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang telah dan sedang terjadi yang diuji dalam bentuk hipotesis.[68] Hipotesis menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mnegetahui apakah suatu variabel berasosiasi dengan variabel lainnya ataukah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi oleh variabel lainnya.[69] Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab bagi perubahan yang terjadi pada variabel terikat.[70] Perkembangan konflik yang mengalami internasionalisasi terjadi dalam dua proses yaitu intervensi dan eskalasi. Tipe penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang meliputi data kualitatif dan kuantitatif dari buku, artikel dalam jurnal, majalah, surat kabar dan situs internet atau yang disebut dengan studi kepustakaan.[71] Pengumpulan data data untuk penelitian diambil dari beberapa sumber utama yaitu, Human Right Watch, Invisible Children, LRA Crisis Tracker, Accord, The Enough Project, dan The Resolve.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan mengamati situasi kejadian, interaksi, serta tingkah laku para aktor dan aktor lain yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam

[68] Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 19.
[69] Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 21.
[70] Suryana, *Metodologi Penelitian,* 34-35.
[71] Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survey,* 71.

prosenya penulis mengacu pada kegiatan analisis menurut Miles dan Huberman yang menyatakan bahwasanya terdapat alur kegiatan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. [72]

1.6.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dibatasi dalam jangka waktu antara tahun 2008 ketika perjanjian Juba Peace Talks gagal dan adanya perkembangan konflik LRA. Penulis membatasi penelitian dari tahun 2008 sampai tahun 2012 ketika terjadi dua kali serangan besar oleh LRA di daerah RDK yang disebut Christmass Massacre dan Makombo Massacre dalam rentang waktu tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah; rumusan masalah; kerangka pemikiran; hipotesis; dan metode penelitian yang mencakup definisi konseptual dan operasionalisasi konsep, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai proses negosiasi Juba Peace Talks dan internasionalisasi politik berkaitan dengan intervensi Sudan Selatan dan OCHA.

Bab III membahas tentang eskalasi konflik LRA setelah gagalnya negosiasi Juba Peace Talks di RDK, meliputi operasi militer Operation Ligthning Thunder, Makombo Massacre, dan Chritsmas Massacre. Tahap internasionalisasi militer dijelaskan melalui intervensi pada saat terjadi eskalasi konflik.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis pada tiap-tiap bab sebelumnya dan sintesis hasil analisis tersebut.

[72] Wiliam, *Your Research Project,* 310.